

1. Tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa adalah untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang hak, kewajiban, nilai-nilai demokratis, serta partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial.
2. Saya harap dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di tingkat universitas, mahasiswa dapat menjadi warga negara yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan aktif dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta kemajuan negara.
3. Demokrasi merupakan konsep yang ambigu karena implementasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, budaya, dan sosial suatu negara. Sebagai contoh, apa yang dianggap demokratis di satu negara mungkin tidak sama di negara lain.
4. Visi pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan masyarakat yang demokratis, beradab, dan bertanggung jawab. Misi pendidikan kewarganegaraan adalah mengembangkan pemahaman tentang konsep demokrasi, mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Visi dan misi tersebut masih relevan untuk saat ini karena pentingnya membangun masyarakat yang berbudaya demokratis.
5. Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan meliputi konsep demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi politik, pluralisme, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Sebagai contoh, dalam mempelajari konsep demokrasi, mahasiswa dapat membandingkan sistem demokrasi di berbagai negara.
6. Indonesia mempertimbangkan falsafah dan identitas nasional dalam demokrasiya dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan negara dan menghormati keberagaman budaya serta agama dalam kehidupan berdemokrasi.
7. Indonesia mempertimbangkan pengalaman sejarah I dalam demokrasiya dengan memperhatikan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan serta memperbaiki sistem politik yang terus berkembang.
8. Pelaksanaan demokrasi masa orde baru di Indonesia ditandai dengan dominasi kekuasaan pemerintah dan pembatasan kebebasan sipil serta oposisi politik.

9. Indonesia saat ini masih berada dalam proses menuju demokrasi Pancasila yang lebih baik. Meskipun masih ada tantangan seperti korupsi dan ketimpangan, namun ada upaya untuk memperkuat institusi demokratis dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

10. Struktur infra politis merupakan kerangka kerja yang mencakup lembaga-lembaga politik, sistem hukum, dan mekanisme politik dalam sebuah negara. Struktur ini dapat berkontribusi dalam memperkuat demokrasi dengan memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap pemerintah, mempromosikan partisipasi politik yang inklusif, dan melindungi hak asasi manusia.